

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA EKONOMI KELAUTAN: SISTEM PEMBIAYAAN NELAYAN

OPTIMIZATION OF ECONOMICS MARINE RESOURCES: FISHERMAN FUNDING SYSTEM

Rr. Retno Rizki Dini Yuliana

Pusat Penelitian Ekonomi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan,
E-mail: rizkidy@gmail.com

Editor : Mochammad Nadjib

Penerbit : LIPI Press

Tahun Terbit : 2013

Jumlah halaman: xiv + 193 halaman

Indonesia sebagai negara maritim tentunya memiliki kekayaan laut yang melimpah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pun mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Kekayaan laut hasil tangkapan para nelayan tidak hanya dipasarkan untuk memenuhi pasar dalam negeri tetapi juga di ekspor ke luar negeri. Potensi yang besar tersebut seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup dan menyejahterakan masyarakat nelayan. Namun sayangnya selama ini sebagian besar masyarakat nelayan justru berada di bawah garis kemiskinan. Beragam faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Bunga rampai ini membahas mengenai beragam permasalahan yang dihadapi nelayan dari sisi sosial ekonomi hingga pola pembiayaan yang tepat bagi nelayan. Analisis kualitatif dan pendekatan empati dikembangkan untuk memahami persoalan secara komprehensif. Selanjutnya dengan pendekatan ekonomi kelembagaan dan sosio-antropologis digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan nelayan. Melalui bunga rampai ini diketahui bahwa ternyata sudah sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda, lembaga keuangan enggan menyalurkan pembiayaan ke sektor perikanan tangkap.

Usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang padat modal yaitu untuk pengadaan kapal dan alat tangkap, modal melaut, serta perbaikan kapal dan alat tangkap. Oleh karena itu, nelayan sangat membutuhkan pembiayaan. Namun, penghasilan nelayan yang tidak pasti, agunan yang tidak mudah dijual merupakan beberapa alasan yang membuat bank enggan menyalurkan kredit ke sektor perikanan tangkap. Hal ini menyebabkan para nelayan mencari alternatif sumber pembiayaan lain yaitu dari pedagang, tengkulak, dan rentenir atau pelepas uang. Walaupun harus membayar dengan bunga yang tinggi tetapi mereka memberi kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh modal. Pola pembiayaan tersebut telah ada sejak pertengahan abad ke-19, peran *pachter* atau penyewa telah mendorong usaha penangkapan ikan di Pantai Utara Jawa hingga mampu berkembang dan membangun jaringan bisnis di sektor perikanan.

Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1907, sempat mengeluarkan surat edaran mengenai penyaluran kredit ke usaha pertambakan dan penangkapan ikan namun ternyata bank tetap tidak berani mengambil risiko. Dimulai dari strategi kebijakan Pelita I pada tahun 1970 hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada tahun 2011 belum mampu peran perbankan ke sektor perikanan tangkap. Program

pemerintah dalam pemberdayaan nelayan selama ini mengalami kegagalan dalam implementasinya karena belum terkonsep dan terkoordinir dengan baik, serta tidak mengadopsi aspek-aspek dalam kearifan lokal. Program pembiayaan perikanan tangkap tidak hanya dilakukan oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui kredit penguatan modal usaha, kredit program pemerintah, BMT, dan Koperasi.

Bunga rampai ini menggambarkan kondisi wilayah Pasongsongan beserta kondisi nelayannya. Potensi perikanan yang besar mulai menurun jumlah produksinya sejak tahun 2009 akibat telah terjadi penangkapan berlebihan (*overfishing*). Para nelayan masih menggunakan alat tangkap yang sederhana dan pola penangkapan setiap hari (*one day fishing*) sehingga hasil tangkapannya sedikit. Pola bagi hasil selama ini digunakan sebagai pola pemerataan risiko dan ketidakpastian antara pandhiga (buruh nelayan) dan pemilik perahu. Hubungan patron-klien di daerah penelitian Pasongsongan juga sangat mendominasi sebagai sumber pembiayaan. Pengepul sebagai patron berperan sebagai pemberi modal kepada nelayan, dan nelayan sebagai klien berkewajiban menjual hasil tangkapannya kepada pengepul dengan harga yang tidak elastis dan dipotong dengan angsuran.

Permasalahan yang dihadapi nelayan dalam memperoleh pembiayaan terbentur kepada jaminan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak adanya legalitas usaha, dan ketidakpastian pendapatan. Salah satu Baitul Maal wat Tamwil yang berhasil menerapkan pembiayaan sistem syariah untuk nelayan yaitu BMT-Nahdatul Ulama. BMT-NU memberikan pembiayaan ke sektor perikanan tangkap dengan konsep *qordhul al-hasan* dan *rahn* (gadai). Pemahaman keagamaan yang dilakukan kepada peminjam dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan denda atau bunga. Skema pembiayaan yang diberikan pun disesuaikan dengan pekerjaan dan pendapatan peminjam.

Sumber pembiayaan lain bagi nelayan yaitu sumber pembiayaan informal yang berasal dari keluarga atau kerabat, orenge atau juragan, dan pedagang ikan. Dalam bunga rampai ini, penulis merekomendasikan beberapa pola pembiayaan nelayan tangkap yaitu mengadopsi pola pembiayaan informal, pola pembiayaan untuk skala menengah besar dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil dan skema KUR, serta pola pembiayaan syariah. Sedangkan model pemberdayaan masyarakat yang dapat dengan model Grameen Bank. Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh berbagai pihak seperti pemerintah dalam memfasilitasi serifikasi, pembentukan kelembagaan nelayan, penyediaan infrastruktur bagi nelayan dan penjaminan pemasaran, serta perusahaan asuransi untuk penjaminan asuransi kapal.

Bunga rampai ini memberi pemahaman dan masukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan sektor perikanan tangkap dan pembiayaan. Melalui buku ini, dapat diketahui kondisi nelayan dan usaha perikanan tangkap, serta pentingnya pembiayaan bagi nelayan. Peran lembaga pembiayaan yang selama ini belum menyentuh sektor ini diharapkan dapat meningkatkan perannya melalui pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik nelayan dan usaha perikanan tangkap. Dalam hal ini tentunya tidak hanya membutuhkan peran lembaga keuangan tetapi juga pemerintah dan perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nadjib, M. (ed). (2013). *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*. Jakarta: LIPI Press.